

BAB I

PENDAHULUAN

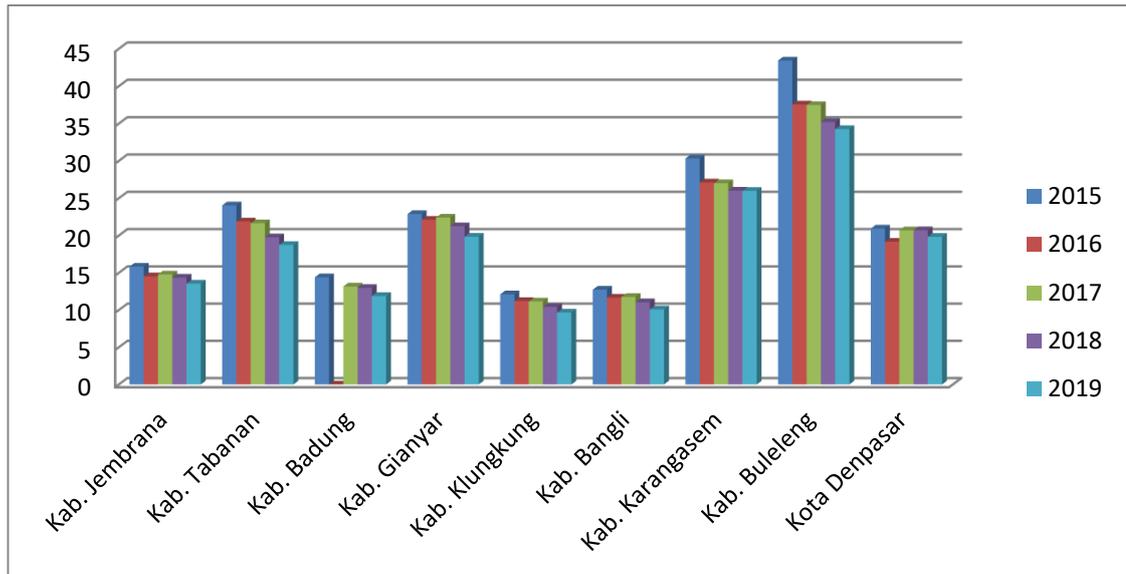
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami proses pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat, dalam mencapai suatu kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan di masyarakat. Upaya penanggulangan untuk mencegah dampak yang lebih luas diakibatkan permasalahan Kemiskinan ini seperti dampak sosial yang dapat menimbulkan tingkat kejahatan yang terus meningkat karena orang berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan rasa aman bagi masyarakat pun terganggu dan pada akhirnya akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemiskinan dapat mengakibatkan kualitas pembangunan manusia yang rendah karena ketidakmampuan masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya (Musa, 2014).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang klasik dan mendasar bagi bagian besar negara yang sedang berkembang termasuk negara Indonesia. Kemiskinan bukan hanya mempersoalkan kurang pendapatan dan kepemilikan harta akan tetapi lebih luas dari pada yang disebutkan. Kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, Kemiskinan adalah masalah sandang, pangan dan papan, Kemiskinan adalah masalah lapangan pekerjaan, dan kesimpulan dari pengertian Kemiskinan adalah masalah ketidakpastian masa depan, serta singkatnya Kemiskinan adalah masalah serba kekurangan.

Bali merupakan suatu provinsi di Indonesia yang terdiri atas 8 kabupaten, 1 wilayah kota dan 57 kecamatan dengan perbedaan karakteristik dimasing-masing wilayahnya. Perbedaan karakteristik baik dari letak geografis dan potensi sumber daya yang berbeda di masing-masing wilayahnya mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di Bali, sehingga pola pembangunan ekonominya menjadi tidak seragam dan menimbulkan kemampuan tumbuh yang berbeda. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya. Ketimpangan pembangunan dapat meliputi Ketimpangan Pendapatan perkapita, dan ketimpangan dalam kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri.

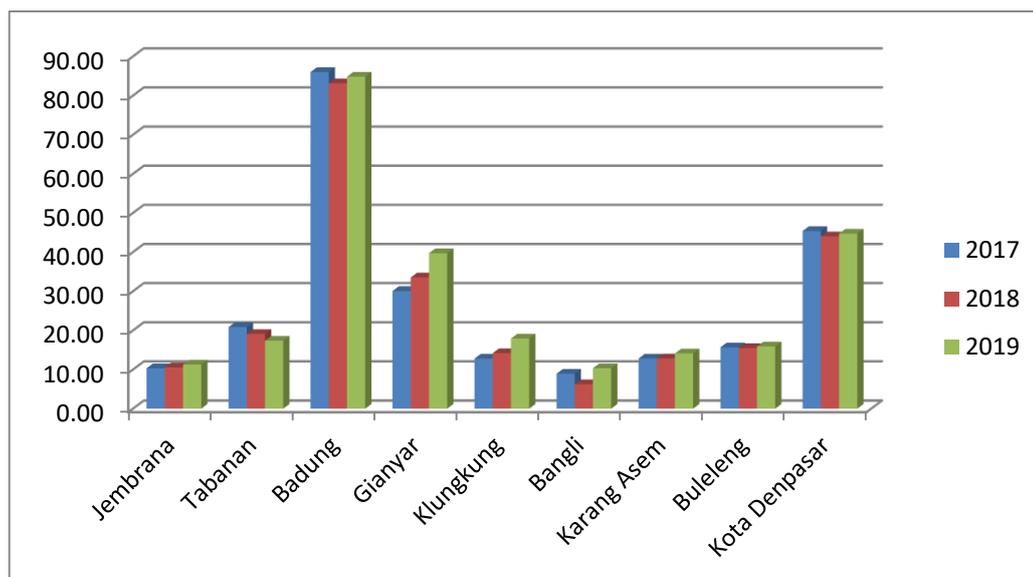
Provinsi Bali memiliki struktur perekonomian yang sangat unik, dimana pendapatan daerah berasal dari sektor pariwisata, sedangkan sector lain berperan sebagai sektor pendukung. Provinsi Bali sampai saat ini masih memiliki penduduk miskin, meskipun Kemiskinan di Provinsi Bali tergolong rendah bila dibandingkan dengan tingkat Kemiskinan nasional. Apabila dilihat dari urutannya, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, di tengah pesatnya perkembangan perekonomian tersebut masih ditemukan jumlah penduduk miskin. Pada kabupaten/kota yang kaya akan potensi ekonomi memiliki potensi yang lebih besar untuk berkembang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota yang tergolong dalam daerah miskin. Provinsi Bali sebagai salah satu wilayah dengan sebaran yang cukup tinggi juga mengalami ketidakmerataan dalam percepatan pembangunan antar wilayahnya.



Sumber : BPS, 2019; Data Diolah

Gambar 1.1 Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Bali

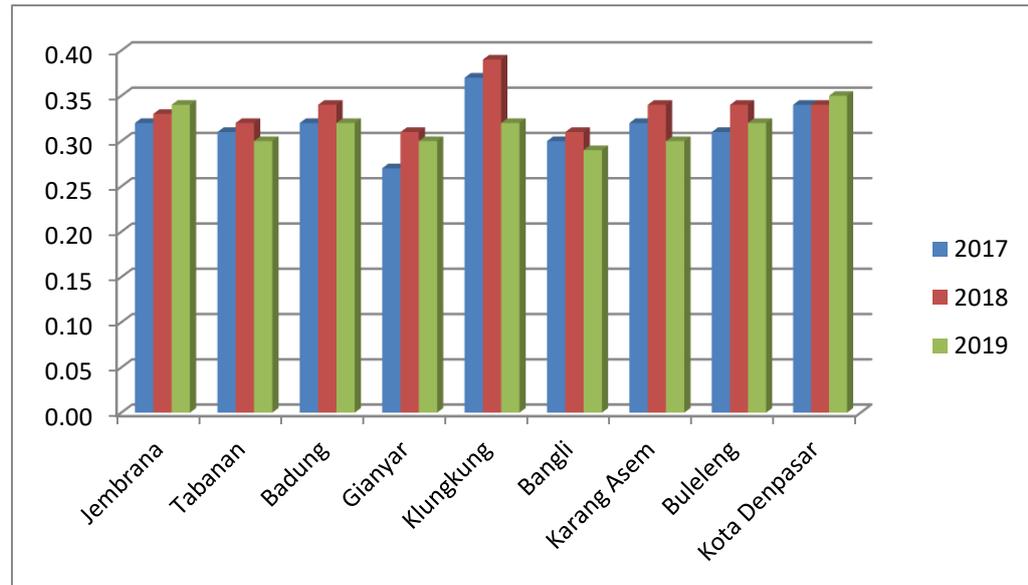
Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat Kemiskinan Provinsi Bali cenderung mengalami fluktuasi. Angka Kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 45,90 sedangkan pada tahun 2019 tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 34,29% turun sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi Kemiskinan antara lain desentralisasi fiskal. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar 1.2 berikut ini.



Sumber : BPS, 2019; Data Diolah

Gambar 1.2 Desentralisasi Fiskal Kab/Kota Provinsi Bali

Pemerintah Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan yang disertai dengan sumber daya pada pemerintah daerah sehingga daerah memiliki kewenangan dan kekuatan yang lebih besar melaksanakan kebijakan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Faktor kedua yang mempengaruhi Kemiskinan adalah Pertumbuhan Ekonomi yang dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut.



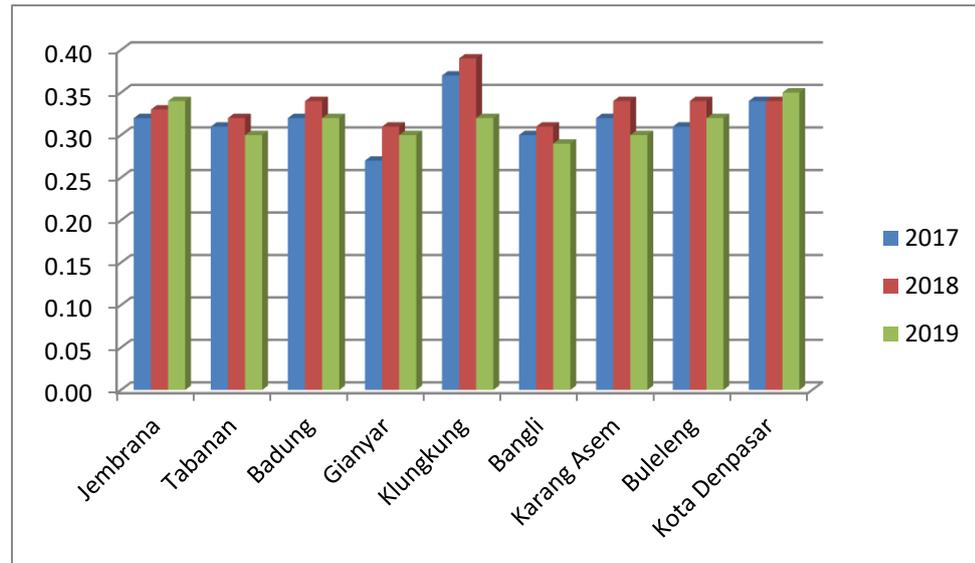
Sumber : BPS, 2019; Data Diolah

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Bali

Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Kemiskinan adalah isu-isu yang selalu menarik untuk dipelajari. Para ahli mencurahkan perhatian yang cukup besar terhadap hal ini (Yin, 2003; Bourguignon, 2004; Ravalion, 2005; dan Warr, 2006). Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi (Produk Domestik Bruto-PDB). Diharapkan dengan PDB yang tinggi maka akan tercipta *trickledown effect* sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Isu tentang Pertumbuhan Ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan Kemiskinan telah lama menjadi fokus utama pembangunan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Analisa hubungan segitiga antara ketiga hal tersebut telah menjadi bahan perdebatan yang panjang dan sangat menarik terutama pada pemilihan strategi pembangunan ekonomi dalam upaya pengentasan Kemiskinan. Pertama, apakah lebih mendahulukan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dengan mengesampingkan pembagian distribusi pendapatan. Kedua, apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata

tanpa harus mengorbankan Pertumbuhan Ekonomi. Di sisi lain, adanya permasalahan Kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan menghambat laju Pertumbuhan Ekonomi itu sendiri. Selain itu, Kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan memberikan dampak instabilita sosial, ketidakpastian, dan tragedi kemanusiaan seperti kelaparan, tingkat kesehatan yang rendah dan gizi buruk. Bila keadaan tersebut terus berlanjut pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi makro dan kelangsungan pemerintahan yang ada.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kemiskinan yakni Ketimpangan Pendapatan yang dijelaskan pada gambar 1.4 dibawah ini. Menurut Hajji (2010), Ketimpangan Pendapatan dapat ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal di suatu negara. Ketimpangan Pendapatan akan terjadi pada tahap awal Pertumbuhan Ekonomi. Pada masa ini distribusi pendapatan akan memburuk namun ditahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan dan ketimpangan akan terkikis sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat yang lebih setara.



Sumber : BPS, 2019; Data Diolah

Gambar 1.4 Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota Provinsi Bali

Dapat dilihat Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota Provinsi Bali pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi naik turun. Nilai Ketimpangan Pendapatan terendah terjadi di kabupaten Gianyar dan nilai Ketimpangan Pendapatan tertinggi terjadi di kabupaten Bangli.

1.2 Rumusan Masalah

Angka Kemiskinan di Indonesia setiap tahun semakin bertambah yang disebabkan padatnya jumlah penduduk di Indonesia dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat Kemiskinan yang cukup tinggi. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah di Provinsi Bali untuk mengatasi permasalahan tersebut tetapi masih belum dapat teratasi. Dalam penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil sehingga penulis ingin meneliti kembali. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali?
2. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali?
3. Apakah terdapat pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali
3. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencegah pembahasan yang telalu melebar, penulis ingin mempersempit cakupan penelitian dalam penelitian ini agar lebih fokus dan lebih mendalami dalam meneliti.
2. Penelitian ini mencakup series data selama periode 2010 sampai 2019 pada Provinsi Bali.

3. Variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan sebagai variabel *independent* dan Kemiskinan sebagai variabel *dependen*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya pada Kabupaten atau Kota Provinsi Bali mengenai “Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali” sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan strategi serta keputusan apa saja guna untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Bali.

2. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Manfaat Kebijakan

Memberikan informasi yang dapat mengetahui analisis pengaruh desentralisasi fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.